

Keterlibatan Warga dalam Pembentukan Ruang Publik (Analisa Pembentukan Ruang Publik dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta)

Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2013, 2 (1): 1 – 16

**Adi Himawan, Drajat Tri Kartono,
Supriyadi SN¹**

Abstract

This research was conducted to offer a democratic practice model in the era of openness, decentralization and direct local head election. It is the model opening communication spaces within our society post-new order era taking into account cultural, economic and political pluralities. A public policy should be based on the public interest. In democratic world, the broad space for idea exchange and argumentation is opened well when the policy will be implemented by the government.

This research was taken place in Surakarta. This study belonged to a qualitative one with phenomenological approach. The sample of research consisted of traditional market seller, municipal government and Surakarta people. Technique of analyzing data used was domain analysis.

In the currently developing democratic world, every collective decision making in the form of public policy impossibly occurs without featuring the public space schemata having penetrated many social actions and practices. Public space is the one where the citizens can express their opinions, interest, and needs discursively. Traditional market revitalization policy becomes one important policy taken by Surakarta's Mayor in managing the city he heads.

Keywords: Public space, consensus, involvement, democracy

Pendahuluan

Di tengah kompleksitas modernitas yang menghadirkan tata ekonomi baru yang lebih berpihak kepada pasar dan tak jarang mengacuhkan tata ekonomi tradisional, hal yang penting dirumuskan adalah studi mengenai pengambilan kebijakan publik secara deliberatif agar tidak terjebak pada godaan politik yang hegemonik dan menindas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan tawaran sebuah model bagi praktik demokrasi di era keterbukaan, desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung. Model yang membuka ruang-ruang komunikasi politis di dalam masyarakat kita pasca era orde baru yang mempertimbangkan pluralitas budaya, ekonomi maupun politik.

Studi yang berusaha menjangkau bagaimana ruang publik dibentuk oleh warga kota dalam menentukan masa depan kotanya terutama di bidang ekonomi.

¹Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

Menengok ke belakang, sebagai lembaga ekonomi, pasar tradisional telah berkembang cukup lama. Pasar tradisional dalam awal keberadaannya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan wilayah dan terbentuknya kota. Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, pasar tradisional telah mendorong tumbuhnya pemukiman-pemukiman dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya yang pada tahapan selanjutnya berkembang menjadi pusat pemerintahan. Jasa besar pasar tradisional (bersama pelaku-pelaku pasar yang ada didalamnya), hampir tidak terbantahkan terutama jika kita lihat sejarah berdirinya hampir seluruh kota di Indonesia yang awalnya berpusat pada pasar. Secara sosiologis, pasar tradisional memiliki arti penting bagi masyarakat. Pasar tradisional berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan. Karakter khas dari pasar tradisional adalah sistem perdagangan dengan memakai pola harga luncur, tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Dengan pola hubungan ekonomi ini maka interaksi sosial terjalin akrab antara penjual dan pembeli. Sosialitas pun terbangun dalam masyarakat lewat kegiatan ekonomi. Fungsi pasar tradisional juga terus berkembang sebagai pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat dan belakangan menjadi unggulan paket wisata. Inilah aspek historis dan sosiologis pasar tradisional sebagai identitas yang kemudian terpatni dalam benak warganya.

Dalam pemikiran demikian maka pasar tradisional baik bangunan maupun karakter sosialnya merupakan aset daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Runtuhnya pasar tradisional sebetulnya meruntuhkan bangunan sosial, ekonomi kerakyatan dan memori kolektif masyarakatnya, hingga akhirnya menjalar pada pudarnya sosialitas masyarakat. Patut disayangkan jika pasar tradisional tergusur oleh deru modernitas, mengingat, sisi historis, potensi sosial, ekonomi maupun budaya yang telah berkembang lama.

Untuk itu, setiap perubahan terhadap makna dan tata ruang penting untuk di dialogkan dengan warga masyarakat. Ada ruang partisipasi publik yang melibatkan warga dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam komunitasnya. Sehingga identitas yang dikehendaki warga kemudian tidak tercerabut oleh kebijakan satu arah dari pemegang kuasa. Dengan demikian masyarakat memiliki kontrol terhadap perkembangan kotanya. Pasar tradisional pun akan tetap mempunyai pesona tersendiri di tengah kehidupan masyarakat modern jika dikelola secara baik dengan mempertahankan keunikan dan karakter khasnya.

Merujuk pada pemikiran Jurgen Habermas bahwa integrasi dan solidaritas sosial masyarakat dewasa ini tidak dapat dijamin oleh agama atau pandangan-pandangan metafisis melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi sosial untuk mencapai saling pengertian diantara warga kota dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup (Habermas, 2004). Untuk itu

perlu keterlibatan atau partisipasi warga kota yang seluas-luasnya dalam ikut serta menentukan gerak kotanya.

Dalam setiap proses politik melahirkan sikap-sikap politik tertentu. Tak terkecuali dalam implementasi kebijakan pemerintah. Agen memiliki penafsiran terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional sebagai sebuah struktur dan kemudian melahirkan sikap politik. Dua sikap yang menonjol dalam setiap adalah menerima atau menolak implementasi kebijakan tersebut. Dalam kerangka inilah untuk mencapai kesepakatan terbentuklah ruang publik sebagai ruang interaksi dan komunikasi politik.

Untuk itu menjadi relevan melakukan kajian terkait pembentukan ruang publik. Sebuah kajian yang mencoba menelusuri jejak *dialectic of control* dalam setiap penerapan kebijakan public dalam perspektif sosiologis baik secara makro maupun mikro. Pada level makro kita perlu membedah sistem pemerintahan daerah dan kemudian pembentukan ruang publik sebagai struktur yang melingkupi individu dan mempengaruhi tindakan individu untuk tidak menggunakan haknya dalam penentuan kebijakan. Di titik lain kita perlu pula mengkaji pada level mikro terkait sikap politik agen untuk terlibat dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Dalam lain perkataan kita mengkaji dualitas antara struktur dan agen dalam implementasi kebijakan sebagai sebuah skemata. Anthony Giddens memberikan jalan untuk membuka selubung dualitas antara agen dan struktur, antara individu dan sistem sosialnya yakni melalui teori strukturasi (Priyono, 2003).

Lokus kajian yang representatif untuk membaca, menganalisa dan mendapatkan gambaran tentang fenomena pembentukan ruang publik adalah kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Mengapa demikian? Dalam proses pengambilan keputusan bersama (*consensus*) revitalisasi pasar tradisional – dalam hal ini Kota Solo -- memperlihatkan keterlibatan warga kota terutama pedagang yang begitu luar biasa. Para pedagang membentuk asosiasi, paguyuban ataupun bentuk lain sebagai wadah “perjuangan” di tengah kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan pemerintah kota. Mereka berharap wadah tersebut menjadi garda depan dalam memperjuangkan hak-hak pedagang, melindungi dari ragam kebijakan yang merugikan pedagang.

Media massa juga berperan penting dalam pembentukan opini publik. Media massa yang terbit dan hadir di Solo hampir tak melewatkan berita yang mengangkat kisah tentang kebijakan revitalisasi pasar tradisional beserta pro dan kontra di dalamnya. Dialektika terbangun antara harapan pedagang dengan pemerintah kota terkait program revitalisasi dan media massa menjadi perantaranya.

Dengan pendekatan pembentukan ruang publik yang dikenalkan oleh Jurgen Habermas (Hardiman, 2009) penelitian ini mencoba menelusuri jejak-jejak

keterlibatan warga kota dalam pembentukan ruang publik. Paling tidak penelitian ini hendak menelusuri bagaimana warga kota memandang program revitalisasi, di dalamnya terkait kesadaran, pengetahuan dan kepentingan baik individual maupun kelompok. Penelitian ini kemudian berkembang ke dalam upaya bagaimana jejaring kekuasaan, keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah secara institusional. Terakhir bagaimana sistem kelembagaan, aturan, norma yang diterapkan sebagai konsensus bersama dalam program revitalisasi pasar tradisional.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang pembentukan ruang publik dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta pada tahun 2009-2012.

Sebagai sebuah kota, Surakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa ini mempunyai karakteristik yang khas. Di kota inilah sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Mangkunegaran. Sebuah kota yang banyak dikenal sebagai kota budaya dengan berbagai stereotip yang muncul seperti masyarakat yang lembut, hingga hadirnya simbolisasi *puteri solo*, dan sebagainya. Kota Surakarta atau akrab disebut dengan Kota Surakarta, di tengah terpaan modernisasi sekarang ini nampak jelas berusaha untuk memposisikan diri sebagai kota yang modern namun tidak ingin meninggalkan tradisi ataupun budayanya sendiri. Publik kemudian membaca Surakarta sebagai kota yang memadukan tradisionalisme dan modernisme. Kota Solo dengan moto "Solo in the Past is Solo in the Future", kemudian menjadi identitas yang mendasari perkembangan kota ini.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan satu pendekatan metodologis dalam penelitian kualitatif (Mudjiyanto dan Kenda, 2011). Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *fenomenon* yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah "gejala".

Fenomenologi menurut Husserl (Mudjiyanto dan Kenda, 2011) memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada/tampak. Fenomenologi merupakan studi tentang pengalaman yang disadari (*conscious experience*), jadi peneliti mencoba untuk menggali pengalaman yang disadari oleh responden penelitiannya bukan meneliti sesuatu yang diluar responden penelitiannya atau sesuatu diluar pengalaman sadar responden penelitiannya (Prianti, 2011). Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik suatu fenomena. Dengan demikian peneliti

harus bertolak dari subyek (manusia) serta kesadarannya, berupaya kembali pada “benda-benda”. Benda yang dimaksud disini merupakan subyek yang diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya.

Metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fonomenologi membantu peneliti memasuki sudut pandang orang lain, dan berupaya memahami mengapa mereka demikian. Fenomenologi mengesampingkan gagasan-gagasan awal peneliti mengenai suatu peristiwa atau pengalaman dengan tujuan memahaminya dari dunia tempat para informan berada.

Dalam usaha melihat hakikat diri tersebut, Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi (Mudjiyanto dan Kenda, 2011), yaitu penundaan atau penyaringan Istilah lain dari reduksi adalah *ephoce* segala pengetahuan yang ada tentang obyek sebelum pengamatan intuitif dilakukan.

Pengumpulan Data

Pembentukan ruang publik dalam revitalisasi pasar tradisional merupakan forum komunikasi antara pedagang pasar tradisional, masyarakat dan pemerintah. Dimana masing-masing elemen saling berdialog, mengkomunikasikan masing-masing kebutuhan, kepentingan dan apa yang menjadi tujuannya. Data-data dari kelompok atau unsur di luar kelompok sasaran, merupakan informasi yang penting untuk membantu melakukan telaah atas kondisi sosial historis yang terjadi dalam masyarakat setempat. Data dari pemerintah maupun unsur masyarakat yang lain, dapat menjadi *point entry* dalam memetakan permasalahan, kepentingan, ide dan gagasan. Oleh karena itu data yang diperlukan meliputi data dari:

- a. Pemerintah Kota Surakarta. Untuk pemerintah pengggalian data melalui wawancara dilakukan kepada Walikota Kota Surakarta dan Kepala Dinas Pasar Tradisional Kota Surakarta. Langkah selanjutnya, masing-masing unsur pemerintah tersebut terlibat dalam proses FGD. Dalam proses FGD tersebut, selain digali permasalahan yang selama ini terjadi, diharapkan terbangun hubungan interpersonal. Sehingga ada keterbukaan serta dorongan kepada pemuda untuk berpartisipasi dan memperjuangkan aspirasinya.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat dipergunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan permasalahan mengenai perencanaan dan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Aktivist LSM juga terlibat dalam FGD untuk memperdalam dan mengungkap data.
- c. Akademisi, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung di dalam menyuarakan aspirasi dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional.

- d. Dokumentasi hasil-hasil studi terkait dengan kajian pembentukan ruang publik di era desentralisasi.

Analisa Data

Kunci dari penelitian fenomenologi adalah kemampuan peneliti untuk melakukan reduksi, peneliti harus mampu melupakan pengertian-pengertian tentang obyek untuk sementara. Dengan demikian sejak tahap pra lapangan, lapangan hingga analisis data peneliti harus menempatkan obyek penelitian untuk “bicara tentang dirinya”.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan kategorisasi, pengelompokan data kemudian dilakukan analisa. Teknik analisa yang digunakan adalah *analisa domain*. Peneliti membandingkan variasi pembentukan ruang publik di setiap lokasi penelitian. Melihat karakteristik pedagang sebagai informan dengan melihat latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan serta partisipasi politik. Kemudian dibandingkan pula dengan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi politiknya. Dengan cara analisa ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan pembentukan ruang publik berdasarkan variasi karakteristik pasar tradisional, pengetahuan dan kesadaran serta partisipasi politik pedagang pasar tradisional

Ada tiga level analisa yakni individual, institusi dan sistem. Individual berkaitan dengan motivasi, persepsi dan pengetahuan. Sedang institusi berkaitan dengan sumber daya sosial dimana pengaruh institusi seperti partai politik, organisasi masyarakat amat berpengaruh. Dan sistem berkaitan dengan undang-undang dan kebijakan lain terkait dengan revitalisasi pasar tradisional.

Dalam analisa data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memungkinkan analisis didasarkan pada penghayatan intuitif atau versi subyektif sebagaimana didapatkan dari pengamatan partisipatoris dan wawancara langsung yang mendalam. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan setidaknya tiga langkah, yaitu: *interpretasi*, *ekstrapolasi* dan *meaning*.

Penafsiran adalah tetap berpegang pada materi yang ada, dicari latar belakangnya, konteksnya agar dapat ditemukan konsep atau gagasannya secara lebih jelas. Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal dibalik yang tersajikan. Memberikan makna merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Materi yang tersajikan, seperti juga ekstrapolasi dilihat tidak lebih dari tanda-tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh. Dibalik yang tersajikan bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti empirik logik, sedangkan pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik ataupun yang transendental.

Alur analisis yang digunakan pada penelitian ini membagi empat tahap analisis data, yaitu: (1) deskripsi fenomena, (2) identifikasi tema-tema, (3) melakukan interpretasi (4) abstraksi intisari dari setiap data yang telah diinterpretasi.

Hasil Dan Pembahasan

Perubahan sosial ekonomi di Indonesia memunculkan gejala sosial baru yakni berkembangnya pasar modern dalam bentuk mall, pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan lain sebagainya. Pasar modern ini tak hanya tumbuh di perkotaan namun hadir dan berkembang hingga pedesaan. Hal ini tentu bukan sekedar sebuah ekspansi ekonomis semata akan tetapi telah memunculkan pola baru menyangkut relasi sosial ekonomi.

Gejala di atas juga dialami oleh Kota Surakarta. Sebagai sebuah kota yang berada di jalur tengah perhubungan di Pulau Jawa.

Sektor perdagangan adalah sektor ekonomi yang bisa menggambarkan secara langsung kondisi perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan cerminan dari tingkat konsumsi masyarakat. Indikator awal dari kondisi perekonomian yang mengalami *booming* atau resesi terlihat dari kenaikan atau penurunan transaksi dalam sektor perdagangan. Penurunan atau kenaikan daya beli masyarakat juga nampak dari perkembangan sektor perdagangan.

Gerak ekonomi Kota Surakarta juga didorong oleh keberadaan pasar tradisional. Hal ini nampak jelas bahwa penyumbang terbesar retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar, di dalamnya termasuk pasar tradisional. Pada APBD 2010 sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah mencapai Rp12.509.447.000 (27%). Retribusi pedagang pasar tradisional ini menjadi tumpuan gerak ekonomi Kota Surakarta. Potensi ekonomi pasar tradisional di Kota Surakarta tentu akan menjadi lebih besar lagi jika dikelola dengan baik.

Saat ini jumlah pasar tradisional di Kota Surakarta adalah 41 pasar, tersebar di lima kecamatan. Setiap pasar memiliki kekhasan produk, dengan luas pasar dan jumlah pedagang yang beragam.

Kebijakan pemerintah kota untuk merevitalisasi pasar tradisional dihadapkan pada harapan warga pasar terhadap bentuk dan hasil revitalisasi. Dalam proses ini pemerintah memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan yang telah direncanakan sedang pedagang pasar memiliki hak pula untuk menerima ataupun menolak kebijakan tersebut. Proses *dialectic of control* ini harus dijembatani agar tidak terjadi persinggungan yang justru merugikan kedua belah pihak.

Dalam praktek politik modern, jembatan yang dibangun adalah dalam bentuk dialog. Melalui dialog inilah kedua belah pihak dapat mengkomunikasikan pandangan, keinginan dan harapannya. Inilah yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai demokrasi deliberatif, demokrasi yang dibangun atas dasar permusyawarahan.

Ruang publik yang terbangun dalam proses revitalisasi pasar tradisional merupakan ruang publik politik. Dalam praktek politik modern, jembatan yang dibangun untuk mencapai konsensus bersama adalah dalam bentuk dialog. Melalui dialog inilah kedua belah pihak dapat mengkomunikasikan pandangan, keinginan dan harapannya. Inilah apa yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai demokrasi deliberatif, demokrasi yang dibangun atas dasar permusyawarahan.

Ruang publik yang membentuk secara eksplisit fungsi politis dalam hubungan antara negara dengan masyarakat. Bentuk-bentuk ruang publik politik sebagai jembatan yang mewarnai proses tercapainya konsensus revitalisasi pasar tradisional adalah pertama, pertemuan yang diselenggarakan pemerintah kota, kedua pertemuan yang diselenggarakan oleh pedagang maupun masyarakat umum serta dalam bentuk event-event kebudayaan yang bertujuan melakukan upaya pembentukan opini akan eksistensi pasar tradisional.

Penataan pasar tradisional menjadi hal yang dibutuhkan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tumbuh dan kembangnya ekonomi lokal. Pasar tradisional mempunyai nilai strategis dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Menjadi harapan setiap pihak bahwa segenap potensi yang ada di dalam pasar tradisional dapat didayagunakan, dikelola oleh pemerintah daerah sehingga pasar tradisional mampu bertahan dan menjadi kekuatan ekonomi. Begitu juga halnya, dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Surakarta. Segenap komponen kota berharap pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kota.

Sebagian besar pedagang yang ada dipasar tradisional menginginkan adanya revitalisasi terhadap pasar yang ditempatinya. Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta menunjukkan prosentase angka yang menginginkan adanya revitalisasi sebesar 74,8% dari seluruh jumlah pedagang yang ada dipasar tradisional Kota Surakarta. Sedangkan yang tidak menginginkan adanya revitalisasi sejumlah 25,2% dari seluruh jumlah pedagang yang ada di Pasar Tradisional Kota Surakarta (DPP Kota Surakarta, 2010).

Beragam pandangan tentang revitalisasi pasar tradisional dengan segenap permasalahan serta penyelesaiannya menjadi perbincangan yang hangat. Wacana, ide, gagasan terkait kebijakan revitalisasi pasar tradisional dengan cepat berkembang dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Revitalisasi

kemudian bukan lagi monopoli pemerintah kota maupun pedagang pasar, akan tetapi menjadi ruang bagi siapa saja untuk memperbincangkannya.

Revitalisasi pasar tradisional kemudian menjadi diskursus, menjadi isu, wacana yang diperbincangkan oleh siapa saja. Diskursus dalam pemikiran Jurgen Habermas dipandang sebagai upaya untuk mencapai sebuah konsensus intersubyektif melalui percakapan-percakapan. Jadi diskursus adalah bentuk refleksi tindakan komunikatif dengan sarana argumentasi bersifat kritis dan terbuka. Diskursus merupakan bentuk komunikasi modern di mana orang tidak begitu saja menerima sesuatu dengan pemahaman-pahaman yang berkembang lewat tradisi, melainkan menguji hal itu dengan pertimbangan rasional.

Visi-misi yang dicanangkan Jokowi dalam memimpin Kota Surakarta adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi spirit Solo sebagai Kota Budaya. Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keberpihakan kepada ekonomi lokal, pasangan Jokowi-Rudi mencanangkan misi mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang.

Visi dan misi inilah yang menjadi kontrak politik selama memimpin Kota Surakarta. Dengan menempatkan misi melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang menjadikan Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang secara tegas menempatkan pasar tradisional sebagai salah satu lembaga ekonomi di tengah hiruk pikuk modernisasi dan penetrasi pasar modern di perkotaan.

Dalam banyak hal Walikota Kota Surakarta membuka ruang yang lebar bagi upaya perlindungan pedagang pasar tradisional. Pemerintah kota menempatkan diri untuk membantu pedagang mengatasi kesulitan yang dihadapi. Seperti pada saat pembangunan kembali pasar Nusukan pasca kebakaran. Revitalisasi merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap keberadaan pasar tradisional. Kebijakan ini juga mendapat apresiasi yang baik dari pedagang pasar tradisional.

Upaya untuk mencapai sebuah program revitalisasi yang partisipatif dibutuhkan sinergi antara pemerintah kota dengan pedagang serta masyarakat umum. Dalam kerangka hubungan antara pemerintah kota dan pedagang, dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan komunikasi intensif, baik formal maupun informal.

Gagasan bahwa pedagang menjadi subyek utama dalam proses revitalisasi ini mendorong pedagang untuk memiliki ikatan ke dalam, dan mewujudkannya dalam bentuk organisasi. Pedagang membentuk asosiasi, paguyuban ataupun bentuk lain sebagai wadah “perjuangan” di masing-masing pasar tradisional. Paguyuban menjadi wadah bersama membangun kebersamaan di tengah kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan pemerintah kota. Mereka berharap wadah tersebut menjadi garda depan dalam memperjuangkan hak-hak pedagang, melindungi dari ragam kebijakan yang merugikan pedagang.

Dalam situasi pasar tradisional banyak terbakar, maraknya pembangunan mall, dan pedagang pasar tradisional masih banyak keterbatasan dalam hal berorganisasi dan memperjuangkan hak-haknya. Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Surakarta (PAPATSUTA) merupakan paguyuban pedagang yang lahir pada saat pasar tradisional dalam kondisi yang memprihatinkan ini.

Keprihatinan pedagang pasar tradisional akan nasib pasarnya yang terdesak oleh kekuatan modal besar dalam wujud pasar modern serta membaca kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan warga pasar menjadikan Papatsuta menjadi wadah perjuangan. Revitalisasi holistik merupakan bentuk revitalisasi yang tak sekedar fisik bangunan, revitalisasi yang partisipatif dan revitalisasi yang mampu memberdayakan pedagang.

Keterlibatan warga masyarakat dalam upaya pengembangan kota menjadi hal yang teramat penting. Keterlibatan warga masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan arah gerak pembangunan kota akan meningkatkan kohesivitas kota. Merujuk pada pemikiran Habermas bahwa integrasi dan solidaritas sosial masyarakat dewasa ini tidak dapat dijamin oleh agama atau pandangan pandangan metafisis melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi sosial untuk mencapai saling pengertian diantara warga kota dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup. Untuk itu perlu keterlibatan warga kota atau partisipasi yang seluas-luasnya dalam ikut serta menentukan gerak kota-nya.

Dalam kacamata yang lebih lebar, partisipasi warga terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu bentuk hubungan negara dan masyarakat. Anthony Giddens memberikan gambaran bahwa hubungan negara dan masyarakat merupakan hubungan *social practice*, bagaimana keduanya menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal yang penting disini adalah interaksi antara negara dan masyarakat, antara struktur dan agensi. Di dalamnya terjadi proses tawar menawar atau *dialectic of control* yang merupakan inti dari seluruh dinamika interaksi tersebut. Negara memakai legitimasinya untuk mengontrol masyarakat tetapi masyarakat mempertahankan diri dengan hak-hak yang dimilikinya, yaitu *citizens rights*. Dengan demikian hubungan negara dan masyarakat bukanlah sebuah

hubungan yang statis, tetapi hubungan yang terus-menerus berubah (dinamis). Hubungan antara negara dan masyarakat inilah yang kemudian biasa disebut dengan proses politik.

Dalam kerangka demikian keterlibatan masyarakat dalam revitalisasi pasar tradisional menjadi hal yang sewajarnya bahkan dibutuhkan. Warga masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan kontrol atas jalannya revitalisasi. Sinergitas antara pemerintah kota, pedagang dan masyarakat umum dalam proses revitalisasi pasar tradisional menjadi hal yang menunjang keberhasilan proses revitalisasi.

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional kemudian berkembang menjadi isu bersama seluruh warga kota dan masuk ke dalam ranah ruang publik. Ranah publik di sini terdiri dari organ-organ informasi dan perdebatan politik, seperti surat kabar, asosiasi atau paguyuban pedagang, seminar di mana diskusi sosio-politik berlangsung. Konsep ranah publik yang diangkat Habermas ini adalah ruang bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang. Pada ranah publik ini, warga privat (*private people*) berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana nalar publik tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara.

Di dalam ranah publik inilah, segenap perdebatan tentang revitalisasi pasar tradisional diperbincangkan. Dengan prinsip dialog yang penuh kesetaraan mengkritik arah kebijakan pemerintah, harapan pedagang hingga warga kota semuanya diperbincangkan. Diskursus diangkat dari respons pedagang pasar tradisional, masyarakat umum hingga media massa terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Inilah diskursus yang terbangun dalam revitalisasi pasar tradisional. Beragam respon ini kemudian diperbincangkan dalam ruang publik yang kemudian menghadirkan konsensus bersama atas revitalisasi pasar tradisional.

Untuk mencapai revitalisasi pasar tradisional yang memberi nilai manfaat bagi kelangsungan kehidupan kota maupun pedagang, dibutuhkan upaya yang sinergis untuk mencapai konsensus bersama. Konsensus yang dibangun atas dasar kesetaraan, hubungan sosial yang mengesampingkan status dan diskusi yang bersendikan partisipasi aktif anggotanya. Praktek revitalisasi pasar tradisional ini dijalankan atas konsensus yang dibangun oleh pemerintah kota, pedagang dan masyarakat umum.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Keterlibatan warga terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu bentuk hubungan negara dan masyarakat. Hubungan negara dan masyarakat merupakan hubungan *social practice*, bagaimana keduanya menjalani kehidupan sehari-harinya. Interaksi antara negara dan

masyarakat, antara struktur dan agensi menjadi hal yang penting disini. Di dalamnya terjadi proses tawar menawar atau *dialectic of control* yang merupakan inti dari seluruh dinamika interaksi tersebut. Proses tawar-menawar yang kemudian menghasilkan kebijakan, sistem yang kemudian menjadi kerangka acuan dalam bertindak.

Keterlibatan individu dalam dalam ruang publik memperhitungkan faktor-faktor berikut:

1. Peluang resmi artinya adanya kesempatan seseorang terlibat dalam ruang publik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
2. Sumber daya sosial menjadi faktor yang turut menentukan. Dalam kenyataannya tidak semua orang mempunyai peluang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam ruang public.
3. Motivasi personal, motif yang mendasari kegiatan politik sangat bervariasi, namun keterlibatan warga dalam pembentukan ruang publik dalam revitalisasi pasar tradisional memperlihatkan motivasi rasional mempertahankan kepentingan ekonominya terutama bagi pedagang pasar.

Konsensus yang disepakati oleh seluruh komponen kota, bahwa dalam revitalisasi pasar tradisional haruslah berpedoman dan diarahkan pada upaya:

- a. Revitalisasi sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Revitalisasi sebagai bentuk pemberdayaan

Untuk mencapai konsensus diperlukan jembatan atau perantara yang kemudian dapat menjadi media mengartikulasikan kepentingan dan menemukan berbagai ide, gagasan menjadi sebuah konsensus atas ragam persoalan. Jembatan inilah yang kemudian disebut sebagai ruang publik. Ruang bagi siapa saja untuk menyampaikan gagasan dan ide serta kepentingannya.

Ruang publik yang terbangun dalam proses revitalisasi pasar tradisional lebih dekat dengan ruang publik politik yang terwujud dalam bentuk :

1. Pertemuan oleh pemerintah kota. Pertemuan-pertemuan formal yang digagas oleh pemerintah kota untuk membangun pengertian, kesepahaman yang akhirnya berujung pada konsensus bersama.
2. Pertemuan antar pedagang. Pertemuan formal maupun informal yang digagas oleh pedagang sebagai sarana artikulasi kepentingan dan penyampaian aspirasi pedagang.

3. Pertemuan oleh warga masyarakat. Beragam cara dilakukan untuk mencapainya mulai dari seminar yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, hingga tekanan politik dalam bentuk dengar pendapat dengan DPRD maupun Pemerintah Kota

Event-event kebudayaan yang menjadi sarana untuk membangun opini dan upaya menampakkan eksistensi pasar tradisional di tengah masyarakat kota.

Saran

Perubahan atas pola ekonomi dan relasi sosial dirasakan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan pasca hadirnya pasar-pasar modern. Pasar tradisional yang sebelumnya menjadi ruang ekonomi dan juga sosial warga kemudian *ilang kumandange*, pasar kehilangan eksistensinya seiring dengan ekspansi ekonomi pasar-pasar modern tersebut

Penataan pasar tradisional menjadi hal yang dibutuhkan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tumbuh dan kembangnya ekonomi lokal. Alasan utamanya adalah pasar tradisional mempunyai nilai strategis dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Menjadi harapan setiap pihak bahwa segenap potensi yang ada di dalam pasar tradisional dapat didayagunakan, dikelola oleh pemerintah daerah sehingga pasar tradisional mampu bertahan dan menjadi kekuatan ekonomi.

Konsep dasar ruang publik ada pada *spirit* kesetaraan, saling penghargaan, demokratis, membuka ruang kritik, tidak terhegemoni maupun terintervensi oleh relasi kuasa yang asimetris. Ruang publik mengandaikan terbukanya ruang perdebatan egaliter sampai pada validitas yang paling sah dan dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika ruang publik sebagai sebuah etos, habitus dan juga ruang (*space*) secara fisik telah meminggir karena relasi kuasa yang asimetris maka tentu harapan akan ruang publik itu kini makin mengecil.

Beberapa saran atas hasil penelitian ini baik bagi pemerintah maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai komponen kota, pedagang pasar, kelompok-kelompok masyarakat maupun media massa tidak perlu menunggu dari pemerintah untuk terbentuknya ruang publik tetapi terlibat di dalamnya untuk memperjuangkan habitus tersebut.
- b. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas atas pengelolaan kota harus mengikuti dinamika masyarakat dan mengembangkan pola relasi sosial yang demokratis, transparan, dan akuntabel
- c. Ruang publik merupakan ruang yang tercipta secara sosial karena proses-proses sosial di dalamnya.

- d. Setiap perubahan terhadap makna dan tata ruang mestinya juga didialogkan dengan warga kota. Ada ruang partisipasi publik. Sehingga identitas yang dikehendaki warga kemudian tidak tercerabut oleh kebijakan satu arah dari pemegang kuasa. Dengan demikian masyarakat memiliki kontrol terhadap perkembangan kotanya. Pasar tradisional pun akan tetap mempunyai pesona tersendiri di tengah kehidupan masyarakat modern asal dikelola dengan baik dengan mempertahankan keunikan dan karakter khasnya.
- e. Pemahaman bersama bahwa modernitas membawa konsekuensi yakni kompleksitas dalam orientasi nilai, kepentingan, budaya, ekonomi maupun politik warga kota terhadap kotanya. Maka persoalan utamanya adalah bagaimana integrasi sosial dan solidaritas sosial tetap dijaga di tengah-tengah fakta kompleksitas nilai tadi. Upaya untuk terus menerus mengembangkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kota menjadi jawabannya. Untuk itu menjadi kebutuhan bersama untuk mendorong tumbuhnya ruang publik yang semakin luas.

Daftar Pustaka

- Alisyahbana, 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Perss.
- _____, 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota, Resistensi Sektor Informal Dalam Perspektif Sosiologis*. Yogyakarta: LaksBang Press
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Gramedia.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 1996
- Geertz, Clifford. 1989. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Giddens, Anthony, 2001. *Runaway World: Dunia yang Lepas Kendali*, Jakarta: Gramedia
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono. 1995. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial*. Yogyakarta: Pedati.
- Habermas, Jurgen. 2004. *Krisis Legitimasi*, Yogyakarta: Qalam
- Hadi Sabari Yunus. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- _____. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius
- _____. 2004. *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?*. Majalah Basis Edisi 75 Tahun Jurgen Habermas. Tahun ke 53, November – Desember tahun 2004.
- Huntington, Samuel. P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartono, Drajat Tri. 2004. *Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Surakarta:UNS Press
- Koentjaraningrat, 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia,
- Matthew, B dan Huberman, Michael, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press,
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. Hari. dkk, 1999. *Runtuhnya Kekuasaan “Kraton Alit” (Studi Radikalisasi Sosial Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta)*, Surakarta : LPTP.
- Pemerintah Kota Surakarta. 2007. *Memboyong 989 PKL Dari Banjarsari ke Semanggi*. Surakarta: BIK Pemkot Surakarta
- Priyono, Herry B. 2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia
- Sulisyo, Eko. dkk. 2004. *Masyarakat Marjinal di Kota Surakarta: Kajian Implikasi Otonomi Daerah Dalam Pemberdayaan*. Surakarta: Kompip dan Ford Foundation.
- Vegeer, K.J. 1985. *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurnal**
- Bambang Mudjiyanto dan N. Kenda, *Metode Fenomenologi sebagai Salah Satu Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Komunikologi*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, BPPI No. 11 Tahun 2010.
- Meuthia Roesfadhila, 2007. *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, Jurnal Smeru No. 22 Tahun 2007

Sri Budiyati, 2007. *Pasar Tradisional dengan Struktur Bangunan Bertingkat: Siapa yang Diuntungkan*. Jurnal Smeru No. 22 Tahun 2007